

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh

Syamsidar Hidayah B

Email: syamsidarhidayah10@gmail.com

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

Syamsidar Hidayah B, 2019. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr.Sri Astuty, S.E., M.Si dan Syamsu Alam, S.Si.M.Si. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi belanja daerah yaitu belanja langsung dan tidak langsung di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, yaitu periode 2013 – 2017. Dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan alat ukur yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja tidak langsung dikategorikan efektif. Sedangkan belanja langsung dikategorikan kurang efektif selama tahun 2013-2017. Belanja tidak langsung dikategorikan efisien. Sedangkan belanja langsung dikategorikan sangat efisien 2013-2017.

Syamsidar Hidayah B, 2019. *Analysis of Financial Expenditures for Regional Expenditures in South Sulawesi Province. Thesis, Development Economics Study Program, Faculty of Economics, Makassar State University. Supervised by Dr. Sri Astuty, S.E., M.Sc and Syamsu Alam, S.Si. M.Sc. The purpose of this study is to learn how to increase and increase regional expenditure for direct and indirect spending in South Sulawesi Province. The data used in this study are time series data, namely the period 2013 - 2017. In the financial analysis of the local government, measuring instruments are used, namely efficiency ratios and efficiency ratios. The results of this study prove that indirect spending is categorized as effective. Whereas direct expenditure is categorized as less effective during 2013-2017. Indirect shopping is categorized as efficient. While direct spending is categorized as very efficient in 2013-2017.*

Keyword: *efficiency, efficiency, Expenditures for Regional*

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan sebuah sistem yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengurus semua sumber daya yang berada di daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah memiliki kebebasan dalam menjalankan dan menyusun setiap agenda yang akan dijalankan di daerah tersebut. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi Kedudukan aspek keuangan daerah sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka terdapat beberapa aturan dan prinsip-prinsip penganggaran yang harus ditaati, diantaranya: 1) pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik, 2) adanya kejelasan misi dalam pengelolaan keuangan daerah, 3) desentralisasi dan pelibatan *stakeholders*, 4) sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan (transparansi, pengendalian dan akuntabilitas), 5) bentuk dan struktur APBD serta anggaran berbasis kinerja, 6) pengembangan sistem informasi keuangan dan transparansi laporan keuangan. Prasetyo dalam Nurdin (2005).

Namun demikian dalam prakteknya tetap saja terdapat celah yang menjadi

permasalahan dalam mengimplementasikan manajemen keuangan daerah sesuai dengan kaidah – kaidah di atas. Diantaranya adalah sistem penganggaran tradisional yang bersifat *line – item*, dimana proses penyusunan anggaran daerah semata – mata hanya mendasarkan pada ketersediaan dana untuk item – item yang sudah ditentukan serta mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Adanya kecenderungan masih rendahnya kemauan untuk meningkatkan transparansi anggaran yang tercermin pada tingginya alokasi belanja aparatur dibandingkan dengan alokasi belanja publik, serta masih banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam proses penyusunan anggaran. (Prasetyo, 2005). Disamping itu, pada saat penyusunan anggaran berbagai pertanyaan akan muncul, bagaimana membawa kepentingan masyarakat ke dalam pernyataan anggaran yang mempunyai aspek kesejahteraan umum. Bagaimana pengalokasian yang adil antara belanja aparatur dan belanja publik.

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah otonom memiliki hak, wewenang maupun kewajiban dalam mengurus sendiri setiap urusan daerah mereka masing – masing, termasuk dalam mengelola keuangan pemerintah daerah masing – masing.

Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud. Pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan perekonomian daerah. Menurut Tim LPEM–PSEKP–PSP (2004) menyebutkan bahwa salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang cukup efektif adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar yang penting adalah pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi dan penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi dengan baik akan meningkatkan kondisi pembangunan daerah maupun nasional.

Selain kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi belanja pemerintah juga mempengaruhi jumlah pengangguran Menurut teori ekonomi Keynesian dalam

Sadono Sukirno (2000), menjelaskan variabel pemerintah dalam hal ini adalah anggaran dijadikan salah satu faktor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat menciptakan *multiplier effect* pada sektor – sektor perekonomian lain. *Multiplier effect* tersebut akan semakin besar jika asumsi belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini disebabkan ketika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka akan menstimulus kegiatan perekonomian di suatu daerah dan menciptakan *multiplier effect* yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dijadikan rujukan penelitian yaitu

1. Bagaimanakah tingkat efisiensi belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2017?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2017?

B. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan permasalahan, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

B. Landasan Teori dan Konsep

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Halim, 2012). Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka - angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2010). Analisis terhadap laporan keuangan dianggap menjadi alat manajerial yang penting untuk evaluasi kekuatan, dan kelemahan suatu perusahaan, dan menurut Groves, Godsey, dan Shulman dalam Turley (2014).

2. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan

kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan Hery (2015).

3. Jenis Rasio Keuangan Daerah

Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan alat yang digunakan untuk analisis, salah satu alat yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja suatu organisasi adalah menggunakan rasio keuangan. Berikut ini merupakan salah satu rasio keuangan yang dikembangkan berdasarkan data keuangan.

a) Konsep Efektivitas

1) Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai

tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handyaningrat S. (2006) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri Sedarmayanti (2009). Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”

2) Mengukur Efektivitas

Efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Rumusan rasio efektivitas pengelolaan anggaran belanja adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2007).

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900–327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

b) Konsep Efisiensi

1) Pengertian Efisiensi

Kata efisien berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Pengukuran Efisiensi

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Rumusan efisiensi yang akan digunakan adalah rasio dari realisasi pengeluaran (belanja) daerah dengan total realisasi belanja daerah.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{realisasi}}{\text{total realisasi}} \times 100 \%$$

Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.

- 3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- 5) Jika hasil pencapaian kurang dari 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

4. Kebijakan Fiskal

Keynes mengemukakan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian. Sejak saat itu, para ekonom mulai mempertimbangkan dampak makro atas belanja pemerintah dan pajak. Keynes menekankan bahwa kenaikan belanja pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari swasta ke pemerintah. Intervensi pemerintah, yang dikenal dengan kebijakan fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah. Pemikiran ekonom – ekonom aliran Keynesian dimana mereka mendasari pemikiran bahwa variabel pemerintah (khususnya anggaran) dianggap sebagai salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan nantinya hal ini diharapkan akan menciptakan *Multiplier effect* pada sektor – sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect*

pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi.

5. Pengeluaran Pemerintah

Penerapan kebijakan otonomi daerah mengakibatkan pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah daerah berubah menjadi sebuah pemerintahan sendiri yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur daerahnya dalam batasan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini tercatat dalam *European Charter of Local Self Government* (Bailey dalam Siagian 2010):

Local self government denotes the right and the ability of local authorities, within the limits of the law, to regulate and manage substantial share of public affairs under their own responsibility and in the interest of the local population...local authorities shall be entitled within national economic policy to adequate financial resources of their own, of which they may dispose freely within the framework of their powers.

Sehingga dengan diberlakukannya kebijakan/sistem otonomi daerah, maka setiap wilayah kabupaten/kota dapat menyediakan berbagai pelayanan publik yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan efek dinamisnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki 4 peran yaitu, 1) Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal. 2) Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar. 3) Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian apabila berada dalam keadaan disequilibrium. 4) Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

3. Konsep Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program yaitu: 1) Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. 2) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah. 3) Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 3) Belanja hibah, berupa pengeluaran sukarela yang diberikan pemerintah kepada pemerintah luar negeri, organisasi internasional, badan usaha milik negara. 4) Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus, tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. 5) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana

bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 6) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. 7) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4. Konsep Belanja Langsung

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, seperti: 1) Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 2) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pengadaan barang dan pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. 3) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

METODE PENELITIAN

A. Teknik Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas belanja langsung dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi belanja dengan target belanja. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas di bawah ini.

Gambar 3.2 Rumus Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Gambar 3.3 Rumus Efektivitas
Anggaran belanja tidak langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Target Belanja Tidak Langsung}}$$

Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
 - b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
 - c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
 - d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
 - e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif
2. Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Efisiensi menurut Mulyamah (1987) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Efisiensi belanja daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan realisasi belanja dibagi realisasi total belanja. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rumus sebagai berikut:

Gambar 3.4 Rumus Efisiensi
Anggaran Belanja Langsung

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Gambar 3.5 Rumus Efisiensi
Anggaran Tidak Belanja Langsung

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Realisasi Belanja}}$$

Sementara kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diambil dari Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan yaitu:

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.

- c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

HASIL PENELITIAN

Efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Indikator efektivitas adalah rasio antara realisasi penggunaan belanja dengan target belanja daerah. Efektivitas lebih menitik beratkan kepada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini adalah pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan pemerintah daerah dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Berikut merupakan hasil analisis efektivitas data

belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun penelitian.

Bedasarkan hasil penelitian pada tahun 2013 belanja tidak langsung sebesar 99 % dikategorikan efektif, sedangkan belanja langsung dikategorikan kurang efektif dengan nilai 66 %. Tahun 2014 belanja tidak langsung dikategorikan sangat efektif dengan nilai 107 sedangkan belanja langsung kurang efektif dengan nilai 76 %. Pada tahun 2015 belanja tidak langsung dengan nilai 96 % dikategorikan efektif dan belanja langsung dikategorikan kurang efektif dengan nilai 77 %. Sedangkan pada tahun 2016 belanja tidak langsung dengan nilai 114 % dikategorikan sangat efektif dan belanja langsung dikategorikan cukup efektif dengan nilai 83 %. Secara keseluruhan belanja tidak langsung di provinsi Sulawesi Selatan dikategoriakn efektif. Sedangkan belanja langsung dikategorikan kurang efektif selama tahun 2013 – 2017.

1. Analisis Efisiensi

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisisensi belanja dan

penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Adapun tingkat efisiensi selama tahun penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat efisiensi belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan khususnya belanja tidak langsung dari tahun 2013 sampai 2017 dikategorikan efisien dengan nilai rasio tahun 2013 sebesar 72% . Pada tahun 2014 nilai rasio sebesar 69 % sama dengan tahun 2016. Nilai rasio yang paling baik pada tahun 2015 sebesar 64 % karena semakin rendah nilai rasio maka semakin tinggi tingkat efisiensi belanja daerah tersebut. Secara keseluruhan belanja tidak langsung dikategorikan efisien, sedangkan belanja langsung dikategorikan sangat efisien dengan nilai di bawah 60 % dari tahun 2013 – 2017.

Berdasarkan hasil analisis data belanja pemerintah menunjukkan bahwa dari segi efektivitas pengeluaran belanja tidak langsung lebih efektif dari pada belanja langsung. Mengingat konsep efektivitas yang

menitik beratkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pengeluaran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Belanja langsung yang kurang efektif dapat mempengaruhi pergerakan variabel ekonomi makro hal ini dikarenakan belanja langsung merupakan pengeluaran pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan program – program pemerintah, sedangkan belanja tidak langsung yang konsepnya tidak berhubungan dengan program pemerintah efektif dari pada belanja langsung.

Dari hasil analisis belanja tidak langsung dikategorikan efektif dan efisien, sedangkan belanja langsung dikategorikan sangat efisien namun kurang efektif. Menurut Mardiasmo jika suatu program efektif dan efisien maka program tersebut dapat dikatakan telah memenuhi efektivitas biaya (*cost – effectiveness*). Efektivitas sebagai esensi dari prinsip *value for money* menjadi indikasi dari penggunaan sumber daya yang dimiliki secara optimum, Chaijareonwattana dalam syah (2016).

Belanja daerah merupakan salah satu wujud desentralisasi, desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mengelola

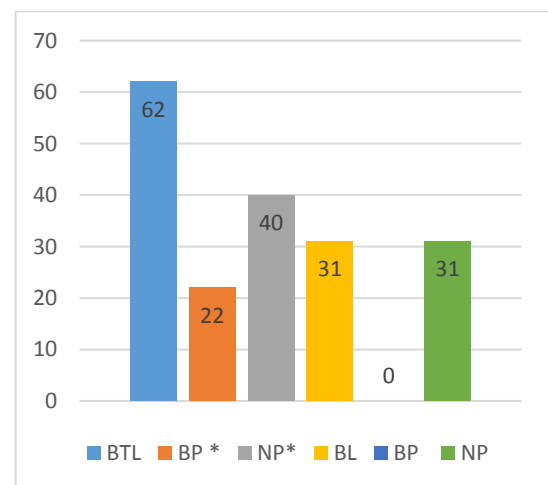
keuangan daerahnya secara efisien dan efektif sehingga tujuan desentralisasi maupun tujuan daerah yang telah ditetapkan seperti pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendidikan dapat dicapai. Deviani (2016) Belanja daerah yang efektif merupakan belanja daerah yang mencapai preferensi yang direncanakan, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran atau memperbaiki pelayanan publik (Ding et al. 2014). Efektivitas belanja juga dipengaruhi secara langsung oleh alokasi belanja, karena terdapat ukuran minimal dalam setiap alokasi belanja agar belanja tersebut menjadi efektif (Zaporozhets et al. 2016).

Prinsip efektivitas biaya sudah diakomodir dalam regulasi pengelolaan keuangan di Indonesia. Pasal 4 PP No 58 Tahun 2005 menyebutkan pengelolaan keuangan dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Efektivitas terlihat dari ukuran – ukuran kinerja yang disebabkan oleh belanja pemerintah. Ukuran kinerja dapat diklasifikasikan menjadi keluaran (*output*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*). Kualitas belanja diduga berpengaruh terhadap ukuran – ukuran kinerja tersebut. Pengaruhnya dapat bersifat

positif dan negatif. Kualitas belanja diduga berpengaruh positif terhadap ukuran kinerja yang diharapkan meningkatkan perekonomian.

Setelah diketahui hasil analisis kualitas kinerja pemerintah dalam merealisasikan belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun analisis, pemerintah terus menambah anggaran belanja daerah pada tahun setelah tahun analisis, mengingat keberhasilan tahun sebelumnya lumrah jika pemerintah menambah proporsi belanja daerah. Namun perlu diketahui peningkatan proporsi belanja daerah yang manakah yang memiliki persentase paling tinggi. Berikut merupakan persentase rata – rata belanja daerah tahun 2013 – 2017.

Gambar 4.1 Persentase Rata – Rata Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2017.



Sumber:

www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Keterangan:

BTL : Belanja Tidak Langsung

P* : Pegawai (dalam belanja tidak langsung)

NP* : Non Pegawai (dalam belanja tidak langsung)

BL : Belanja Langsung

P : Pegawai (dalam belanja langsung)

NP : Non Pegawai (dalam belanja langsung)

Telihat besaran persentase pengalokasian belanja daerah untuk belanja tidak langsung yang mencakup belanja pegawai dan non pegawai (bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, tidak terduga) maupun belanja langsung yang mencakup belanja pegawai dan non pegawai (belanja barang dan jasa serta belanja modal).

Dari lima tahun anggaran belanja tidak langsung selalu lebih dominan diatas 60 % sedangkan belanja langsung hanya di bawah belanja non pegawai (dalam belanja langsung. Pada lima tahun tersebut belanja non pegawai (dalam belanja langsung) menyerap seluruh anggaran sedangkan belanja pegawai tidak terealisasi sedikitpun. Timpangnya belanja langsung dengan belanja tidak langsung tidak dapat dikatakan

melemahkan sistem penganggaran belanja di provinsi Sulawesi Selatan mengingat sebagian besar alokasi belanja tidak langsung masuk pada belanja non pegawai.

Meningkatnya belanja daerah setiap tahun dan penyerapan yang efektif dan efisien ternyata tidak secara nyata mempengaruhi perekonomian. Efektif nya belanja tidak langsung belum mampu secara nyata berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena komposisi belanja tidak langsung tidak ditujukan memperbaiki perekonomian, sedangkan belanja langsung yang kurang efektif dapat di hubungkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran tahun 2013 - 2017, karena komposisi belanja langsung salah satunya dapat memberikan dampak pada perekonomian yaitu belanja modal.

Pada hasil analisis efisiensi, belanja tidak langsung dikategorikan efisien yang artinya pemerintah daerah mampu menghemat input dengan output yang baik, namun jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun dari tahun 2013 – 2017 maka efisien nya belanja tidak langsung tidak begitu berarti pada perekonomian, sama hal nya dengan

kemiskinan dan pengangguran yang cenderung meningkat. Sedangkan pada hasil analisis efisiensi belanja langsung dikategorikan sangat efisien namun berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun serta tidak optimalnya pengangguran kemiskinan dan pengangguran.

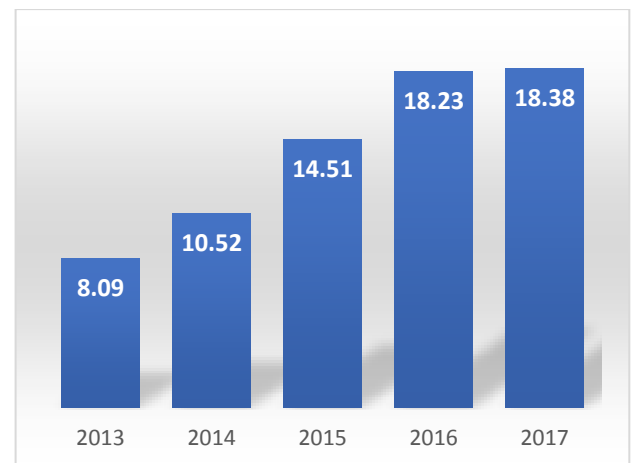
Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, secara umum pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan di fokuskan pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga belanja daerah dapat memperbaiki kualitas masyarakat agar mampu bersaing dan keluar dari kemiskinan dan juga pengangguran. Selain memperbaiki kualitas masyarakat untuk mengurangi pengangguran, pemerintah juga dapat menyerap tenaga kerja dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produksi.

jumlah pengangguran juga mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat, peningkatan paling signifikan pada tahun 2015 pengangguran bertambah 92.45 ribu jiwa atau sebesar 32 %.

Menurut ekonom – ekonom aliran Keynesian dimana mereka mendasari pemikiran bahwa variabel pemerintah (khususnya anggaran) dianggap sebagai

salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan nantinya hal ini diharapkan akan menciptakan *Multiplier effect* pada sektor – sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect* pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi. Namun dari komposisi belanja daerah hanya belanja modal yang dapat dikatakan yang bersifat produktif. Berikut merupakan proporsi penyerapan belanja modal pada tahun 2013 – 2017 di provinsi Sulawesi Selatan.

Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2017.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa proporsi belanja modal sangat kecil hanya di bawah 20 % dari tahun 2013 – 2017

bahkan persentase tertinggi pada tahun 2017 hanya sebesar 18.38 %. Jadi jika mengacu pada pada teori Keynes, wajar saja jika perekonomian tidak membaik dengan meningkatnya belanja daerah setiap tahunnya karena pengeluaran belanja daerah lebih dominan pada belanja tidak langsung yaitu sebesar 69 % yang pada dasarnya belanja tidak langsung merupakan bukan pengeluaran yang bersifat produktif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung dikategorikan efektif. Sedangkan belanja langsung dikategorikan kurang efektif.
2. Belanja tidak langsung dikategorikan efisien. Sedangkan belanja langsung dikategorikan sangat efisien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang sudah dipaparkan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Menggunakan metode analisis yang lebih bervariasi tidak hanya efektifitas dan efisiensi, sebaiknya

menggunakan konsep value for money untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah.

2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan perbandingan belanja daerah antara satu daerah dan daerah lain agar dapat diketahui kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan belanja daerah.
3. Untuk pemerintah daerah, belanja langsung yang kurang efektif, baiknya ditingkatkan dengan cara meminimalkan selisih antara realisasi dengan rencana anggaran belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). *Makassar Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

Basariyah, Siti. 2017. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemekbrdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Propinsi Sulawesi Selatan*. Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.

Deddi dan Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Deni, Friawan, 2008. *Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. CSIS Vol.37 No.2 Juni 2008. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ding C, Niu Y, Lichtenberg E. 2014. *Spending Preferences of Local Officials with*

Off-Budget Land Revenues of Chinese Cities.
China Economic Review.

Dumairy.1997. *Perekonomian Indonesia*.
Jakarta: Erlangga.

Ebel, R.D. dan S. Yilmaz. 2002. *On The Measurement and Impact of Fiscal Desentralization*.www.worldbank.org/decentralization.

Effendy, Onnong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Faud, Ramli Muhammad. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Handayanigrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 1. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.

Internet

www.dpj.kemenkeu.go.id

<https://gosulsel.com>